

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu pelanggaran hukum pidana, yakni pada kondisi seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Di Indonesia korupsi menjadi semacam hal yang sudah wajar dan bahkan telah membudaya. Korupsi ibaratkan kejahatan berantai yang tidak hanya melibatkan satu orang melainkan melibatkan banyak orang dan saling terkait.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna untuk keuntungan pribadi, yang merugikan kepentingan umum dan negara. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. *Transparency International*, sebuah lembaga survey yang berbasis di Berlin, Jerman mengeluarkan data yang menggambarkan betapa tingginya angka korupsi di Indonesia, dibandingkan negara-negara lain. Berikut data tersebut:

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009-2012

Tahun	IPK	Rangking Asia Pasifik	Rangking Dunia
2009	2.8	1	111 dari 180 negara
2010	2.8	1	110 dari 178 negara
2011	3.0	1	100 dari 182 negara
2012	3.2	1	118 dari 176 negara

Sumber: www.transparensy.org/research/cpi/ (diakses pada 12 Oktober 2013 pukul 14:00

WIB)

KPK memiliki data beberapa instansi negara yang melakukan korupsi, antara lain yakni unsur BUMN, kementerian, pemerintah propinsi, DPR RI, komisi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Lebih dalam lagi, KPK telah menggolongkan pelaku korupsi berdasarkan jabatannya, berikut ini adalah tabel pelaku korupsi berdasarkan jabatan.

Tabel 1.3 Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	1	74
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	1	12
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>

(diakses pada 16 April 2014 pukul 15:00 WIB)

dari data di atas menunjukkan bahwa korupsi terbanyak dilakukan oleh pejabat eselon I, II, dan III, dengan jumlah 114, diikuti oleh swasta dengan jumlah 94, lalu anggota DPR dan DPRD berjumlah 74, lainnya 41, walikota/bupati dan wakil berjumlah 35, kepala lembaga/kementrian 12 orang, Hakim 10 orang, Gubernur 10 orang, Komisioner dengan jumlah 7 orang, dan terakhir adalah duta besar dengan jumlah paling sedikit, yakni 4 orang.

Korupsi yang terjadi pada beberapa instansi tersebut terdiri dari bermacam-macam jenis korupsi. Berikut ini adalah tabel data jenis perkara korupsi yang terjadi di Indonesia:

Tabel 1.2 Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-2014
(per 28 Februari 2014)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	2	115
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	0	13
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	4	170
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	1	14
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	0	38
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	11
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	10	364

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi>

(diakses pada tanggal 16 April 2014 pukul 15:52 WIB)

Jumlah kasus korupsi dari keseluruhan jenis perkara pada tabel di atas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan sebanyak satu kasus pada tahun 2011 namun hal ini bukan menjadi awal yang baik bagi tahun selanjutnya karena pada tahun-tahun berikutnya justru mengalami kenaikan yakni pada tahun 2012 dan 2013. Meskipun norma yang dianut menunjukkan bahwa tindak KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merupakan tindakan yang tidak baik karena merupakan sebuah tindakan yang merugikan kepentingan umum, namun masih banyak yang melakukannya dengan sengaja ataupun dengan alasan karena terjebak situasi. Hal ini dikarenakan korupsi berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi bagian dari “aturan” dalam pekerjaan.

Banyaknya kasus korupsi dari beberapa instansi yang ditangani KPK seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar, yakni bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jika berbicara korupsi maka lingkungan berperan besar dalam penyebab tindakan merugikan ini. Menurut Soeganda Priyatna (2011:451) kondisi instansi saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (a) masih adanya karakter patrimonial (di mana para pejabat beranggapan bahwa administrasi politik merupakan urusan pribadi, dan merupakan perluasan dari urusan “rumah tangganya”), (b) masih kentalnya hubungan individual, yang mencerminkan adanya kolusi, nepotisme, dan korupsi, (c) masih kuatnya tradisi rutinitas, dalam arti bahwa bekerja adalah kegiatan rutin tanpa adanya dinamika dan kreativitas, serta cakupan tugas tidak spesifik, tidak jelas prosedur dan mekanismenya, (d) sentralisasi kekuasaan dengan pola yang sangat berbeda dengan birokrasi pada negara-negara maju, yakni pejabat cenderung sewenang-wenang, penggunaan kekerasan/premanisme untuk menangani kasus-kasus yang membahayakan posisinya, penyelesaian masalah dan keputusan didasarkan atas pemikiran kelompok yang terbatas (*group think*).

Komunikasi yang terjalin antara pelaku korupsi dengan lingkungan kerja tersebut tidak lepas dari sebuah proses komunikasi karena proses komunikasi merupakan bagian yang menentukan, apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Proses komunikasi diartikan

sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (message) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan (feed back) untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding) atau antar kedua belah pihak.” (Ruslan 2003 : 69). Sehingga proses komunikasi dianggap penting karena dapat melihat apakah penerima pesan memaknai pesan sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim pesan atau tidak. Selain itu dapat terlihat juga apakah pengirim pesan mendapatkan *feedback* dari komunikan dengan sesuai atau tidak. Maka mengacu pada data KPK di atas yang menunjukkan tingginya angka korupsi pada pejabat DPR/DPRD, peneliti tertarik untuk meneliti proses komunikasi yang terjadi pada pejabat DPR/DPRD. Banyaknya tingkat korupsi pada pejabat tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan “bagaimana proses komunikasi pelaku tindak pidana korupsi dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai fenomena tindak pidana korupsi, maka fokus penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan:

1.2.1 Pertanyaan Makro

Dalam penelitian ini, pertanyaan makro yang disimpulkan adalah: Bagaimana proses komunikasi pelaku tindak pidana korupsi dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi?

1.2.2 Pertanyaan Mikro:

1. Bagaimana interaksi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
2. Bagaimana pesan verbal dan nonverbal antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
3. Bagaimana karakteristik komunikator dalam komunikasi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
4. Bagaimana media yang digunakan antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat dituliskan bahwa tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah komunikasi antara pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan:

1. Mengetahui interaksi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan
2. Mengetahui pesan verbal dan nonverbal antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan?
3. Mengetahui karakteristik komunikator dalam komunikasi antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan
4. Mengetahui media yang digunakan antara koruptor (pejabat DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi) dengan rekan kerja, dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu komunikasi secara umum, dan penyebab-penyebab korupsi dalam sudut pandang proses komunikasi khususnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Untuk Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai proses komunikasi antara perilaku korupsi dan lingkungannya

2. Untuk Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, referensi, atau bahan tambahan bagi akademisi Telkom University umumnya dan Ilmu Komunikasi khususnya dalam penyusunan penelitian kedepan, dalam kajian yang sama.

3. Untuk Masyarakat

Sebagai wawasan bagi masyarakat mengenai bagaimana korupsi terjadi, sehingga dapat menghindarinya setidaknya dari sudut pandang dalam penelitian ini.

1.5 Tahapan Penelitian

Peneliti dalam merancang penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain

1. Mengangkat permasalahan

Peneliti mengangkat korupsi sebagai inti permasalahan yang diteliti, mengingat fenomena korupsi merupakan sebuah kejahatan yang telah membudaya di Indonesia, seperti hal yang biasa hingga membuat pelakunya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindakan korupsi. Dampak negatif dari korupsi sangat besar dan membias, karena selain merugikan beberapa pihak, juga akan mengikis moralitas masyarakat.

2. Memunculkan pertanyaan penelitian

Pertanyaan-pertanyaan ini seputar apa saja penyebab korupsi dalam sudut pandang ilmu komunikasi khususnya proses komunikasi. Pertanyaan dalam penelitian ini bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan yang akan dialami oleh peneliti di lapangan. Saat terjun ke lapangan peneliti mungkin akan menemukan banyak pemahaman baru sehingga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.

3. Mengumpulkan data yang relevan

Data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa kumpulan kata, kumpulan kalimat, kumpulan pernyataan, atau uraian yang mendalam (Herdiansyah, 49:2010). Untuk mendapatkan data yang relevan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*in depth*) dan observasi yang dilakukan kepada satu orang subjek penelitian.

4. Melakukan Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang relevan, selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam melakukan analisis data peneliti sebenarnya sedang melakukan upaya pengembangan teori (Satori, 2011: 203).

5. Menjawab Pertanyaan Penelitian

Tahapan terakhir adalah menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis data yang dilakukan kemudian dikaitkan kembali dengan fenomena yang diangkat untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian (Herdiansyah, 2010: 48).

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan tindak pidana korupsi klas I, Sukamiskin Bandung. Penelitian dilakukan di lapas tersebut karena lapas ini merupakan tempat khusus dan satu-satunya bagi pelaku korupsi dari berbagai daerah di Indonesia, yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan jeratan pasal yang dikenai.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2013 hingga Januari 2014. Berikut adalah *Time Schedule* penelitian:

Tabel 1.5 Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Septem	Okt	Novem	Desem	Januari	Febru	Maret	April
		mber	ober	ber	ber	uari	ari		
1.	Acc Judul								
2.	Penulisan Bab I								
	Bimbingan								
3.	Perizinan ke Lapangan								
4.	Penulisan Bab II								
	Bimbingan								
5.	Pengambilan Bidoata Informan								
6.	Penulisan Bab III								
	Bimbingan								
7.	UP 1								
8.	Seminar								
9.	Wawancara dan pencarian data								
10.	Bab IV								
	Bimbingan								
11.	Penulisan Bab V								
	Bimbingan								
12.	Penyusunan draft skripsi (bab I-V)								
13.	Pendaftaran Sidang Skripsi								

